

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-V, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anonim, 2007, *Mengukur Kinerja Pelayanan Terpadu untuk Perizinan Usaha di Indonesia*. The Asia Foundation.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-IV, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farida, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hardiansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Gava Media, Yogyakarta.
- Harjono, Dhaniswara K., 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan VI, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Kelsen, Hans, 1973, *General Theory of Law and State*, Russell & Russel, New York.
- KPPOD, 2017, *Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016, Survei Pemeringkatan 32 Ibukota Provinsi di Indonesia*, Jakarta.
- Lailam, Tanto, 2017, *Teori & Hukum Perundang-undangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 2009, *Standar Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama.
- Manan, Bagir, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cet. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum ; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mohammad, dkk, 2006, *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muslimin, Amrah, 1982, *Beberapa Asas-asas dan Pengertian-pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Ridwan, H. Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Sampara, Said & Laode Husen, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Kereta Kupa, Makassar.
- Sirajuddin, et all, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Setara Press, Malang.
- Soehino, 1984, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Spelt, N. M dan J.B.J.M. Ten Berge, Philipus M. Hadjon (Ed.), 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsuddin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Thamrin, Husni, 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Cet.II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Utrecht, E., 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Tesis dan Laporan Penelitian

Achmad, Dirga, Matahari Faransahat, Randi Kurniawan, 2017, *Kajian Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Kab. Bantul (Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Perizinan di Kab. Bantul)*, Laporan Penelitian, PT. Inspect Multi Konsultan, Yogyakarta.

Halik, Abdul, 2014, *Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU)*, Laporan Penelitian, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Namaga, Padma Bunga, 2016, *Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Perkembangan Investasi di Kota Tangerang*. Tesis pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rarasati, Endang, 2013, *“Pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal pada BKPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”*, Tesis pada Program Studi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sedubun, Victor Jusuf, 2009, *Penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Peningkatan Investasi di Provinsi Maluku*, Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

The Asia Fondation, 2015, *Reformasi Perizinan Usaha*, Ringkasan Penelitian, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 Tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906).

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478).

Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 2 Tahun 2005).

Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007).

Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011).

Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 40).

Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20).

Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 32).

Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73).

Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 81).

Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 133).

Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16).

Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2011).

Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 82).

Peraturan Bupati Bantul No. 81 Tahun 2015 tentang Pendelegasian kewenangan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 46).

Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

D. Internet

Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Siaran Pers Penghargaan PTSP*, [http://www4.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_BKPM_300516 - Luar Jawa Dominasi Penghargaan PTSP.pdf](http://www4.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_BKPM_300516_-_Luar_Jawa_Dominasi_Penghargaan_PTSP.pdf) diakses tahun 2017.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Debirokratisasi dan Deregulasi*, http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/186 diakses tahun 2017.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bantul, <https://dpmppt.bantulkab.go.id/> diakses tahun 2018.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Boyolali, <http://dpmpptsp.boyolali.go.id/web> diakses tahun 2017.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bantul, <http://dptr.bantulkab.go.id/> 2018

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> diakses tahun 2017.

Jogja Antara News, *Sebagian Industri Kerajinan Bantul Terkendala Legalitas Usaha* <https://jogja.antaranews.com/berita/348610/sebagian-industri-kerajinan-bantul-terkendala-legalitas-usaha> diakses tahun 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata “Pelayanan” dan “Publik”*, <https://kbbi.web.id> diakses tahun 2017.

Nopus Hayati, Anadolu Agency, Ombudsman: Pelayanan Publik Indonesia Rendah, <https://www.aa.com.tr/id/budaya/ombudsman-pelayanan-publik-indonesia-rendah/1009689> diakses tahun 2018.

Star Jogja, *Legalitas Menjadi Salah Satu Kendala UKM di Bantul*, <http://www.starjogja.com/2017/09/22/legalitas-menjadi-salah-satu-kendala-ukm-di-bantul/> diakses tahun 2017.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Hery (Tim Teknis Penyelenggaraan Izin Usaha Industri Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul) tanggal 2 Nopember 2017 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

Wawancara dengan Ibu Noviarni Nurmades, S.H., (Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPT Kab. Bantul) pada tanggal 12 Februari 2018 di Kantor DPMPT Kabupaten Bantul.

Wawancara dengan Ibu Leny Yuliani, S.S., M.A.P., (Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi DPMPT Kabupaten Bantul) pada tanggal 27 Februari 2018 di Kantor DPMPT Kabupaten Bantul.

Wawancara dengan Ibu Wiwin Istiumaya, S.I.P., (Kepala Sub Bagian Program DPMPT Kabupaten Bantul) pada tanggal 19 Februari 2018.

Wawancara dengan Bapak Eko Nugroho, S.I.P (Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Boyolali) pada tanggal 20 Maret 2018 di Kantor DPMPTSP Kab. Boyolali.

Wawancara dengan Ibu El Rusdijanti, S.H., (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Boyolali) pada tanggal 20 Maret 2018 di Kantor DPMPTSP Kab. Boyolali.

F. Sumber lain

Bappeda DIY, 2017, *Road Map Perencanaan Pembangunan Sektor Pelayanan Perizinan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta

BPS Kabupaten Bantul, 2017, *Bantul dalam Angka 2017*, Publikasi Tahunan, Bantul.

DPMPT, 2017, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016*, Bantul.

Syafrudin, Ateng, Tanpa Tahun, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, makalah tidak dipublikasikan.

Wibowo, Richo Andi, 2018, *Perizinan dan Kemudahan Berusaha 2018*, Opini Jawa Pos tanggal 2 Januari 2018, Yogyakarta.

World Bank, 2017, *Doing Bussiness 2017; Equal Opportunity for All*. A World Bank Group Flagship Report, Washington DC.